

Betty Prasetyaning Darmasari

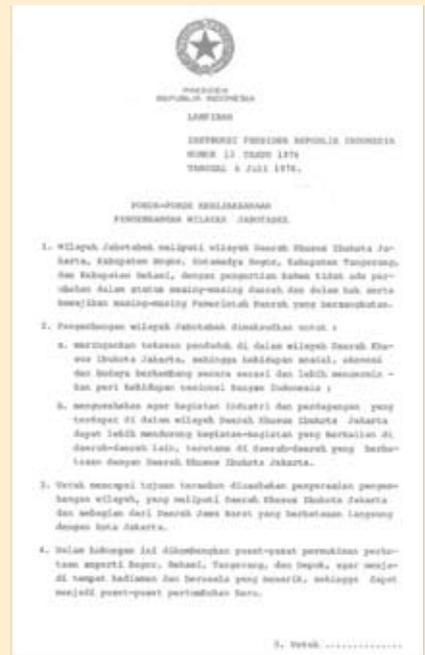
PENGEMBANGAN WILAYAH JABODETABEK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BOGOR

Kota yang berpotensi untuk berkembang menjadi kota besar pada umumnya memiliki dua syarat, yaitu: kondisi geografisnya dan sejarah kota itu sendiri. Kota Bogor, yang secara geografis merupakan daerah pegunungan dan dilalui oleh dua sungai besar, sungai Ciliwung dan Cisadane, memiliki lahan subur. Ditambah dengan letaknya yang dekat dengan Jakarta menjadikan kota Bogor semakin strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pusat kegiatan nasional, perdagangan, transportasi dan pariwisata.

Secara historis Kota Bogor memiliki pengalaman yang panjang sebagai pusat aktifitas suatu pemerintahan sejak masa Kerajaan Pajajaran, Pemerintah Kolonial Belanda, Inggris hingga pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Prasasti Batu Tulis diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Kerajaan Pajajaran terletak di Kota Bogor. Ketika masa pemerintah kolonial Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Gustaaf Willem Baron van Imhoff membangun Istana Buitenzorg atau yang dikenal dengan Istana Bogor pada 1745. Kota Bogor semakin berkembang ketika Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels melintasi wilayah Kota Bogor.

Jabodetabek

Pasca kemerdekaan, Kota Bogor terus mengalami perubahan dan



Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabodetabek
Sumber: Daftar Arsip Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum Tahun 1949-2005, No. 12641, ANRI

perkembangan. Secara administratif Kota Bogor beberapa kali mengalami perubahan nama, yaitu Kota Besar Bogor (UU Nomor 16 Tahun 1950), Kota Praja Bogor (UU Nomor 1 Tahun 1957), Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (UU Nomor 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 tahun 1974) dan Kota Bogor (UU No. 22 Tahun 1999). Perubahan tersebut tentu saja diiringi dengan perkembangan dari berbagai macam sektor kehidupan.

Perkembangan Kota Bogor menjadi begitu pesat ketika tahun

1976 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tentang Pengembangan Wilayah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi. Pengembangan wilayah Jabodetabek dilatarbelakangi semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan di Ibukota Jakarta. Untuk mengurangi tekanan jumlah penduduk akibat hal tersebut maka dibuat pola pemukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara

KHAZANAH

lebih merata, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan Ibukota Jakarta agar menjadi tempat kediaman yang menarik.

Untuk keperluan itu diciptakan iklim yang dapat mendorong kegiatan investasi di wilayah Jabodetabek antara lain dengan pembangunan infrastruktur perhubungan, pengaturan penggunaan tanah, penciptaan lingkungan hidup yang sehat dan pengadaan berbagai sarana sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Dalam mempersiapkan perencanaan pengembangan Jabodetabek dibentuk Tim Perencanaan Jabodetabek yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pembangunan Pemukiman

Dampak dari Instruksi Presiden ini adalah meningkatnya kegiatan perdagangan dan bertambahnya pusat-pusat pemukiman perkotaan di Kota Bogor. Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas) berperan penting terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan di wilayah Jabodetabek. Selama empat kali Pelita (1979-1994), Perum Perumnas telah membangun sebanyak 122.952 unit rumah di kawasan Jabodetabek. Di Kota Bogor sendiri dibangun beberapa perumahan antara lain Perumnas Bantarjati I pada tahun 1980 berjumlah 936 unit dan Perumnas Bantarjati II yang dibangun tahun 1989 sebanyak 700 unit. Pada tahun 1990 dibangun Perumahan Indraprasta I dan Indraprasta II.

Kawasan perumahan lain yang relatif baru adalah di kawasan Bogor bagian Timur sampai dengan Tajur seperti perumahan Villa Duta dan Bogor Nirwana Residence (BNR). Pihak pengembang merencanakan perumahan ini untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Penduduk perumahan ini sebagian besar bekerja di Jakarta dan menggunakan kendaraan pribadi melalui akses jalan tol Jagorawi.



Perumahan Nasional Bantarjati, November 1987
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor



Perumahan Villa Duta, Januari 1987
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor

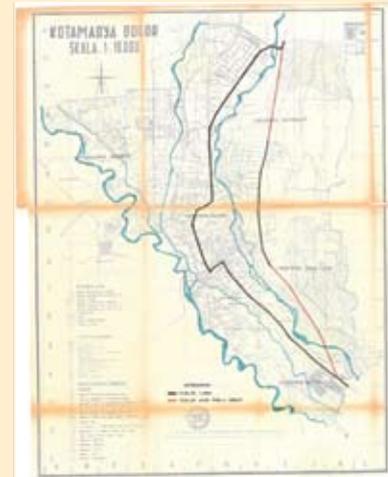
Pembangunan Jalan

Dalam perkembangan suatu kota, jaringan jalan merupakan unsur yang sangat menentukan. Sebelum maraknya pusat-pusat pemukiman pasca pengembangan wilayah Jabodetabek, jaringan jalan di Kota Bogor bisa dikatakan masih sederhana. Ini dapat dilihat dari Peta yang dibuat Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum

dan Tenaga Listrik (PUTL) pada Tahun 1969. Departemen PUTL kemudian merencanakan penambahan beberapa jaringan jalan di dalam Kota Bogor (Bogor By Pass) antara lain dari Sukasari ke Kedung Halang dengan panjang 6,5 km. Penambahan jaringan jalan utama mengakibatkan munculnya jalan-jalan penghubung ke pusat pemukiman atau perumahan-perumahan.



Peresmian Jalan Raya Bogor (sekarang jalan Jendral Sudirman), 4 Juni 1975
 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor



Peta Rencana Jaringan Jalan Tambahan Jakarta-Bogor (Bogor By Pass)
 Sumber: Inventaris Arsip Departemen Pekerjaan Umum 1950-2004, No. 380, ANRI



Jalan Tembus Sindangbarang ke Jalan Dr Semeru, November 1988
 Jalan yang dibangun sebagai salah satu upaya Pemerintah Kodya Bogor untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor

Kemudian pada 1975, diresmikan Jalan Raya Bogor sebuah jalan utama yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor sebelum dibangunnya Jalan Tol Jagorawi. Jalan sepanjang sekitar 45 kilometer ini melintasi Kotamadya Jakarta Timur, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Baru pada tahun 1978 diresmikan jalan tol pertama di

Indonesia yaitu Jalan Tol Jagorawi kependekan dari Jakarta-Bogor-Ciawi.

Jalan tol ini membuat semakin mudah akses dan mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta ke Kota Bogor. Hal ini membuat Kota Bogor menjadi salah satu tujuan favorit untuk

pemukiman dan pariwisata. Akibatnya adalah semakin padatnya jumlah kendaraan di Kota Bogor. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sejumlah pembangunan jalan baru, salah satunya adalah jalan tembus Sindangbarang ke Jalan Dr. Semeru. Panjang jalan di Kota Bogor terus mengalami peningkatan yaitu sekitar 140.05 km pada tahun 1988 menjadi 183.76 km pada tahun 1993.

Kesimpulan

Tidak dipungkiri bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembangunan infrastruktur seperti pemukiman dan jalan raya di Kota Bogor. Pembangunan tersebut merupakan jawaban dari konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk yang bermigrasi dari Jakarta ke Kota Bogor atau sebaliknya. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Kota Bogor telah berhasil mencapai tujuan dari kebijakan pengembangan wilayah Jabodetabek yaitu menjadi pusat pertumbuhan baru selain Ibukota Jakarta.